

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL KE SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**PADA TANGGAL 12-13 SEPTEMBER 2023**

---

**I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah dalam menunjang pengambilan kebijakan di tingkat daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan studi tiru ke Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

**II. WAKTU, MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, tanggal 12-13 September Tahun 2023, dengan maksud untuk studi tiru terkait Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

**III. PESERTA PERJALANAN DINAS**

Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor : T./800.1.11.1/00999/BPK tanggal 5 September Tahun 2023 yang diikuti 50 (lima puluh) dengan peserta Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian, sub koordinator dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah.

**IV. HASIL STUDI TIRU**

Rombongan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diterima oleh Bapak Drs. One Andang Wardoyo, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya dengan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas silaturahmi di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Adapun hasil studi tiru tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha (984,68 *km*<sup>2</sup> ) atau 3,03% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo terbagi atas 15 kecamatan yang terdiri dari 236 desa dan 29 kelurahan.
2. Kabupaten Wonosobo memiliki potensi utama dalam hal pertanian dan perkebunan. Sektor perkebunan terdapat budidaya carica (sejenis papaya khas pegunungan), purwaceng dan sayur mayur.

3. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari 8 (delapan) bagian yakni Administrasi Pembangunan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan, Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, Umum, Protokol dan Kepemimpinan.
4. Dalam kerangka reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan kebijakan perampingan OPD yang bertujuan untuk mewujudkan OPD yang efektif. Penataan struktur OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalami perubahan/restrukturisasi 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2008, 2014, dan 2016. Restrukturisasi tahun 2014 merupakan perampingan yang dilakukan sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ditetapkan. Perampingan struktur tersebut dilakukan dengan mengurangi 323 unit jabatan struktural di semua tingkat eselon, yaitu dari yang semula 779 menjadi 451 unit atau sebesar 41,46%. Sekretariat Daerah yang semula terdiri dari 3 asisten sekda, 5 staf ahli, 9 bagian yang didukung masing-masing 3 sub bagian, sehingga total jumlah sub bagian sebanyak 27 sub bagian. Perubahan struktur Setda menjadi terdiri dari 3 asisten sekda, 3 staf ahli, 10 bagian dan 31 sub bagian. Penambahan bagian yaitu Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang merupakan merger dari Bagian Organisasi dan Badan kepegawaian Daerah (BKD), dan Bagian Keuangan yang merupakan pengalihan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang didukung dengan 4 sub bagian dan adanya pengurangan bagian yaitu Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dialihkan dan digabungkan dengan Dinas Keluarga Berencana.
5. Masalah yang paling mengemuka pada kebijakan perampingan OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah resistensi dari para pegawai (PNS), khususnya para pegawai yang mengalami penurunan eselon maupun yang "kehilangan" jabatan struktural. Resistensi pegawai sebagian besar menyangkut kekhawatiran terhadap berkurangnya penerimaan gaji dan tunjangan sebagai akibat turunnya level eselon ataupun perubahan jabatan.
6. Fungsi pembinaan dan pengawasan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diantaranya dilakukan rapat koordinasi laporan evaluasi bulanan terutama dalam hal penyerapan anggaran, memberikan layanan penunjang pemerintahan serta mendorong Struktur Berbasis Elektronik (SPBE). Hal-hal yang masih menjadi problematika diantaranya belum optimalnya penyusunan regulasi penggunaan dana desa.
7. Terkait pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Wonosobo diampu oleh Bagian Umum.
8. Untuk Kabag-Kabag selaku KPA dan PPK hanya ada PPK Setda dan tidak ada PPK unit.

9. Penatausahaan Keuangan masih menggunakan aplikasi SIMDA dan implementasi SIPD baru pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
10. Diskusi kemudian dilanjutkan oleh masing-masing bagian.

#### V. PENUTUP

Demikian rangkaian hasil studi tiru pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Semoga hasil studi tiru ini memberikan manfaat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bantul pada umumnya.

Notulis



Ana Rahmawati W, S.E.  
NIP. 199404242020122022